

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. B. N. 2017. Analisa Teknis Konversi KM Minajaya 11 Tuna Long Liner Menjadi Kapal Pengangkut Ikan (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Alimuddin, A. 2010. Perizinan Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pesisir. *Inspirasi*, 1(10).
- Audina, R. A. 2018. Penegakan hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar (Studi Pada Kantor Kesyabandara dan otoritas Pelabuhan Sibolga) (Doctoral dissertation).
- Herdiyeni, Yeni., Mahmud Zuhud, Ervizar Amir, & Rudi Heryanto. 2014. Development of Mangrove Database for Biodiversity Informatics of IPB Biopharmaca. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 19 (3): 197-203.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Jakarta.
- Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan. "Perancangan Kapal Perikanan." *Universitas Riau*. Diakses Pada 22 Juni 2022. <https://psp.faperika.unri.ac.id/rancang-bangun-kapal-perikanan/>.
- Kadarisman, M., Yuliantini, Y., & Majid, S. A. 2016. Formulasi kebijakan sistem transportasi laut. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 3(2), 161-183.
- Kismartini. 2020. REFORMASI PELAYANAN PUBLIK: Reformasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Jawa Tengah. Program Studi Doktor Administrasi Publik-FISIP UNDIP. Semarang.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 2021. *Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2021*. PPS Nizam Zachman Jakarta. Jakarta.
- KKP. "Sejarah Pelabuhan Perikanan." *Kementerian Kelautan Dan Perikanan*. Diakses pada 15 juni 2022. <https://kkp.go.id/djpt/ppsnzj/page/1044-sejarahpelabuhan-perikanan>.
- KKP. "Apa perbedaan antara suap, pungutan liar (pungli)/pemerasan, dan gratifikasi?". *Kementerian Kelautan Dan Perikanan*. Diakses pada 16 Agustus 2022. <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/164-apa-perbedaan-antara-suap-pungutan-liar-pungli-pemerasan-dan-gratifikasi>.

- Lubis, E. 2011. Kajian peran strategis pelabuhan perikanan terhadap pengembangan perikanan laut. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 5(2).
- Marwah, S. 2021. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dealam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan (UPT. P2SKP) desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep).
- Menteri Kelautan Dan Perikanan. 2011. *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP:18/MEN/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan*. Jakarta.
- Menteri Kelautan Dan Perikanan. 2004. *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2004 Tentang Perubahan Nama Pelabuhan Perikanan Jakarta Menjadi Pelabuhan Samudera Nizam Zachman Jakarta*. Jakarta.
- Menteri Kelautan Dan Perikanan. 2006. *Peraturan Menenteri Kelautan Dan Perikanan Nomor:Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap*. Jakarta.
- Menteri Perhubungan. 2013. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal*. Jakarta.
- Menteri perhubungan. 2011. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 Tentang Telekomunikasi-Pelayaran*. Jakarta.
- Menteri Kelautan Dan Perikanan. 2019. *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan NO: 11/PERMEN-KP/2019 Tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan*. Jakarta.
- Nastiti, H. G., Wibowo, B. A., & Dewi, D. A. N. N. 2017. Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Kesyahbandaran Dengan Metode Six Sigma Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6(4), 267-275.
- Nugroho, H., Sufyan, A., & Akhwady, R. 2013. Integrasi Sistem Elektronik LogBook Penangkapan Ikan (ELPI) dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS) untuk Pembangunan Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan Nasional*, 8(3), 101.
- Prastyo, A., Fadlan, F., & Fadjriani, L. 2020. Analisis Yuridis Terhadap Keberangkatan Kapal Penumpang Tanpa Adanya Surat Persetujuan Berlayar (Studi Penelitian Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 1-15.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.*
- Rifai, A. 2012. Uji Kinerja Alat Elektronik Logbook (ELogbook) Perikanan. Departemen Ilmu Dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Sofiyanti, N., & Suartini, S. 2016. Pengaruh Jumlah Kapal Perikanan dan Jumlah Nelayan terhadap Hasil Produksi Perikanan di Indonesia. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 1(01).
- Suman, A. Irianto, H.E., Satria, F., & Amri, K. 2016. Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal kebijakan laut indonesia*. Volume 8 nomor 2 nopember 2016 : 97 – 110.
- Suryo, H. M. 2019. Pengaruh Surat Ukur Terhadap Faktor Stabilitas Kapal Sebagai Upaya Dalam Menjamin Keselamatan Pelayaran Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana. *KARYA TULIS*.
- Surahman. 2015. Kelaiklautan Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. *Jakarta: Dephub RI*.
- Suryawati, S. H., Saptanto, S., Wardono, B., Wijaya, R. A., & Witomo, C. M. 2015. Penelitian Analisis Kebijakan Ketersediaan Ikan Menjelang Idul Fitri 1436 H. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 1(2), 57-65.
- Takaendengan, J., Pandey, S. V., & Rompis, S. Y. 2019. Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. *Tekno*, 17(73).
- Wahyudi, G. 2011. Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Wiryanan, B., Palevi, R., & Wahyuningrum, P. I. 2021. Prospek Penerapan Traceability Perikanan Udang Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Implementation Prospects For Traceability of Shrimp Fisheries In Cilacap Oceanic Fishing Port). *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 11(1), 74-88.
- Widiana, E. P. 2019. Analisis Pengaruh Faktor Pemanduan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Stasiun Radio Pantai Dan Kompetensi Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Pada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang). *SKRIPSI*.

- Yana, A. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(1).
- Yuliawan, I. B., Soemarmi, A., & Purnomo, D. 2016. Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Pati. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-16.
- Yulian, D. C. 2019. Proses Penerbitan Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Di Kantor KSOP Kelas II Kijang. *KARYA TULIS*.